

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2017 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo selaku *leading sector*, dan didukung oleh Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kejajar, dan Kecamatan Sapuran.

a. Program Dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp 22.452.728.827,-** atau **1,12%** dari total alokasi APBD Tahun 2017 yang berjumlah **Rp 2.000.613.704.761,-**. Alokasi sebesar **Rp 22.042.728.827,-** dapat terealisasi sebesar **Rp 18.579.034.538,-** atau **82,74 %**. Adapun program dan alokasi anggaran Urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.C.5.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	14.859.145.700	12.387.328.563
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.891.210.000	1.695.533.250
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.592.500.000	5.645.598.800
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	200.000.000	198.261.400
4	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	490.000.000	352.547.900
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	25.000.000	22.005.000
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	410.000.000	243.440.900
7	Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.781.537.700	2.769.705.495
9	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.438.898.000	1.430.235.818
B	Belanja Tidak langsung	7.593.583.127	6.191.705.975
	Jumlah total	22.452.728.827.00	18.579.034.538,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017

b. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2017, dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sampah sebagai sisa residu aktivitas penduduk sehari-hari semakin bertambah volume dan jumlahnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Penanganan persampahan oleh pemerintah kabupaten diwujudkan pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (pajak rokok), pengadaan sarana prasarana pengolahan sampah (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/TPST) (DBHCHT), penyempurnaan TPS wilayah RIK (pajak rokok), penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonosobo (pajak rokok). Sementara itu ditingkat bawah, perangkat daerah kecamatan seperti Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah dan Kecamatan Kejajar juga berperan dalam pengelolaan persampahan yang diwujudkan dengan kegiatan pelatihan Bank Sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, serta peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dalam Pengelolaan Sampah. Kondisi TPA Wonorejo yang membutuhkan ekstra perhatian sehingga dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung optimalisasi TPA Wonorejo. Kegiatan tersebut antara lain: Pembangunan pagar TPA (pajak rokok), Rehab Gudang TPA (pajak rokok), Pembangunan Garasi Armada Angkutan Sampah di TPA (pajak rokok), pembangunan senderan kolam lindi TPA, serta Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan TPA (pajak rokok).

Untuk kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan yaitu pelatihan bank sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dalam Pengelolaan Sampah. Dari beberapa daftar kegiatan diatas, yang paling menunjukkan pengaruh terhadap kenaikan kinerja persentase penanganan sampah yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Adanya partisipasi masyarakat menambah volume sampah yang tertangani, yaitu melalui campur tangan pengepul besar, bank sampah, kelompok pengolah sampah mandiri (KPSM). Sementara itu layanan oleh Pemerintah Kabupaten, masih terbatas pada wilayah perkotaan Wonosobo (dahulu RIK), dan beberapa pasar milik pemda di Kertek, Sapuran dan Kejajar. Untuk kegiatan lainnya dilakukan untuk mendukung kinerja persampahan melalui penyediaan sapras persampahan, optimalisasi sapras di TPA Wonorejo, dan operasionalisasi sehari-hari pengelolaan persampahan.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan/usaha masyarakat berpotensi berdampak pada pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Beberapa kegiatan dalam program ini dilatarbelakangi fenomena masih banyak kegiatan/usaha yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan antara lain, Fasilitasi pembinaan pengendalian

pencemaran lingkungan, Penyusunan Database Usaha berpotensi Dampak Lingkungan (Pajak rokok), Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan Penunjang Adipura (pajak rokok), Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Untuk Masyarakat Desa dan Kelurahan (DBHCHT).

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lingkungan Hidup, Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Wonosobo, Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup. Pada tahun 2017 Kabupaten Wonosobo menyusun Revisi RTRW Kab. Wonosobo, sesuai amanat UU No. 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup semua kebijakan yang dibuat pemerintah harus menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini masih terbatas pada polusi air sehingga dilakukan pemantauan kualitas air. Indikator kualitas air menjadi salah satu input utama dalam penentuan indikator makro indikator kualitas lingkungan hidup. pemantauan kualitas air masih terbatas pada air permukaan, dengan sampel di beberapa sungai di wilayah Kabupaten Wonosobo. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa status mutu air DAS serayu dan Bogowonto adalah tercemar ringan dengan parameter yang berpengaruh adalah BOD, *Fecal Coliform*, Total *Phospat* sebagai P. BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) adalah kebutuhan oksigen biokimia yang menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan dalam reaksi oksidasi oleh bakteri. Tingginya BOD disebabkan tingginya bahan organik yang terlarut dalam air, sedangkan tingginya *Fecal Coliform* menunjukkan banyaknya bakteri *coliiform* yang terdapat dalam feses ternak maupun manusia yang terlarut. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengurangi cemaran yang terlarut ke dalam DAS Serayu dan Bogowonto dengan program kali bersih, pembuatan IPAL Komunal, ataupun Pembuatan IPAL Usaha Skala Kecil dan melaksanakan pembinaan serta monitoring terhadap usaha/kegiatan berdampak penting lainnya.

5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan direktori kondisi mata air, lanjutan pembangunan arboretum, pengendalian dampak perubahan iklim.

6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Keberadaan ruang terbuka hijau merupakan komponen ruang wilayah yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas dan kuantitas selalu diperhitungkan. Ruang hijau dengan tanaman atau vegetasi hijaunya baik berupa pohon, semak, maupun rumput di ruang terbuka mempunyai nilai ekologi untuk keseimbangan alam, yaitu dapat mengurangi dampak negatif akibat kegiatan manusia seperti mengabsorpsi polutan udara, menurunkan suhu, meresapkan air hujan, menangkal suara, dan

sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH dilakukan program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Kegiatan dalam program tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2017 diantaranya rehabilitasi/Pemeliharaan Taman, Perencanaan T-1 Taman Kota Wonosobo, Penunjang Aksi Taman Revolusi Mental, Penyempurnaan Taman Mandala Wisata (Banprov), Pengadaan Smart Lamp Kawasan Wonosobo ASRI Alun-Alun Wonosobo, Penataan Arboretum di Komplek Wisata Kalianget Kabupaten Wonosobo (Banprov), dan Fasilitasi Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan Sapuran.

7) Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Fasilitasi kegiatan adipura yang diampu oleh Kecamatan Wonosobo. Kecamatan Wonosobo yang merupakan ibukota kabupaten menjadi salah satu area titik pantau utama penilaian Adipura.

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi kelembagaan Perangkat Daerah Dinas LH sebagai pengampu urusan lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan, penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

9) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini mencakup kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Kendaraan Roda Tiga) Untuk Pengangkut Sampah, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Komputer, Laptop, Printer). selain itu, dilakukan juga kegiatan pemeliharaan rutin/berkala untuk gedung kantor, kendaraan operasional, peralatan kantor.

c. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada beberapa indikator lingkungan hidup yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel III.C.5.2
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(EKPPD)

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD	Capaian Kinerja (%)	
		2016	2017
1	Persentase penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3)/ Volume produksi sampah (m3) x 100%	31,66%	34,58%
2	Kebersihan Jumlah Pasar tradisional tergolong baik/jumlah seluruh pasar tradisional	33,33% *	36,36%
3	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3)/ Jumlah penduduk x 100%	0,34	0,69
4	Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda/ Jumlah kasus lingkungan yang ada x 100%	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

*: jumlah total pasar pembagi hanya dibatasi pada kewenangan Pemda, yaitu sebanyak 18 pasar

Meskipun kecil, kenaikan persentase penanganan sampah pada level 2,92% cukup untuk diapresiasi. Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) seperti pada tabel diatas terdapat peningkatan capaian pada persentase penanganan sampah. Hal ini karena ada peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah yang memasukkan unsur pengepul sampah dari sektor informal dan beberapa yang dikelola oleh TPS dan bank sampah yang ada di beberapa RW.

Capaian pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup juga didasarkan pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasar Indikator Kinerja RPJMD. Adapun capaiannya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.C.5.3
Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017
berdasarkan Indikator RKPD 2017

	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	%Realisasi Capaian	Status Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,42	65	72,09	110,91	○
2	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan	68%	78,67%	77,7%	98,77	→

III.C.5. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	%Realisasi Capaian	Status Capaian
	pencemaran air					
3	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	78%	84%	86,7%	103,21	○
4	Persentase Kualitas sumber mata air Kelas A	75%	83%	44,13%	53%	↓
5	Indeks Kualitas udara	77,72	72	97,56	135,50	○
6	Indeks kualitas air sungai	65	63	50	79,37	↓
7	Indeks tutupan vegetasi	41,65	46,51	69,55	149,53	○
8	Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	12%	30%	59,65%	198,83	○
9	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100,00	○
10	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	100%	100%	100,00	○
11	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	4,83%	33%	8,34%	25,29	↓
12	Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS	10%	33%	10%	30,30	↓
13	Persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status kualitas udara dan air	0	11%	0	0%	↓
14	Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan Kab. Wonosobo	0	10%	10%	100,00	○
15	Rasio motivator lingkungan thd 10000 penduduk	3,3	4,5	3,18	70,57	↓
16	Persentase usaha yang memiliki IPAL thd industri	27,81%	38%	50%	131,58	○

III.C.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	%Realisasi Capaian	Status Capaian
	wajib IPAL					
17	Persentase luas lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung diluar hutan	38%	34,16%	28%	100	○
18	Persentase sumber mata air yang rusak	6,25%	10%	2,86%	100	○
19	Persentase tutupan vegetasi	74,83%	74,83%	51,23%	68,46	↓
20	Persentase penanganan sampah	31,66%	24,63%	34,58%	140,40	○
21	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,36	0,55	0,34	61,82	↓
22	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R skala kecamatan	0	2	0	0,00	↓
23	Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala desa/kelurahan	1,51%	9,1%	6,04%	66,35	↓
24	Persentase RW yang memiliki bank sampah	6,85%	40,9%	6,85%	16,76	↓
25	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	5%	9%	10,17%	113,07	○
26	Persentase pengoperasian TPA	40%	15%	40%	266,67	○
27	Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan	38,8%	38,98%	41,47%	106,39	○
28	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas perkotaan	75%	80%	75%	93,75%	→
29	Persentase panjang sempadan sungai utama berupa ruang terbuka hijau	88,25%	88,75%	97,65%	90,88%	→

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan olah data, 2017

Keterangan Status Capaian:

- Tercapai Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
- Tidak tercapai Realisasi capaian 90%- 99%
- ↓ Tidak tercapai dan perlu upaya keras Realisasi capaian $\leq 90\%$

III.C.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel IV. C.5.3 diatas, pada urusan lingkungan hidup masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu misalnya terkait indikator penanganan persampahan beserta indikator turunannya, indikator kualitas air sungai, rasio motivator lingkungan hidup per satuan penduduk. Capaian kinerja persampahan yang masih dalam angka 34,58% harus ditingkatkan lagi. Upaya peningkatan kinerja perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, masyarakat dan swasta. Dukungan dari pemerintah desa yang menganggarkan kendaraan angkut sampah harusnya diikuti pula dengan penyediaan TPS terpadu dengan bantuan binaan dari pemerintah daerah. Hal ini karena selama tahun 2017 ada tren kenaikan volume sampah yang masuk di TPA Wonorejo yang berasal dari desa. Sementara itu, desain TPA hanya melayani wilayah RIK perkotaan saja. Jikalau ada penambahan dari luar wilayah layanan, seharusnya hanyalah sampah sisa yang sudah tidak dapat diolah. Upaya peningkatan kinerja ini tentunya tetap membutuhkan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, untuk beberapa data indikator ada yang bersifat berbanding terbalik dengan capaian, sehingga persentase realisasi capaian dianggap pada angka 100 atau tercapai, yaitu pada contoh indikator persentase sumber mata air yang rusak. Perhitungan pemantauan sumber air yang rusak pada tahun 2017 masih sangat terbatas jumlah sampelnya. Oleh karena itu, ditahun mendatang perlu upaya ekstra untuk menyusun data base direktori mata air beserta kondisinya.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.C.5.4

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	6
	b. S-1	9
	c. DI-DIV	4
	d. SMA	16
	e. SMP	7
	f. SD	45
	Jumlah	87
2	Golongan	
	a. Golongan IV	6
	b. Golongan III	15
	c. Golongan II	22
	d. Golongan I	44
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	87
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	1

III.C.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No	Indikator	Jumlah
	b. Esselon III	3
	c. Esselon IV	3
	Staf/Fungsional Umum	80
	Jumlah	87

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonosobo, 2018

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel III.C.5.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Lingkungan Hidup

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
A	ASET TETAP	60.812.506.582,55
1	Tanah	10.113.736.658,00
2	Peralatan dan Mesin	12.237.439.539,55
02	Alat-alat Besar	4.871.606.440,00
03	Alat-alat Angkutan	4.074.457.570,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	277.387.000,00
05	Alat Pertanian	369.713.000,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	854.239.479,55
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	127.719.350,00
08	Alat-alat Kedokteran	0,00
09	Alat Laboratorium	1.662.316.700,00
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
3	Gedung dan Bangunan	28.224.802.371,00
11	Bangunan Gedung	14.087.180.619,00
12	Monumen	14.137.621.752,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.236.128.014,00
13	Jalan dan Jembatan	6.288.905.434,00
14	Bangunan Air/Irigasi	3.575.568.380,00
15	Instalasi	371.654.200,00
16	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	400.000,00
17	Buku dan Perpustakaan	400.000,00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
20	Aset Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
B	ASET LAINNYA	30.000.000,00
7	Aset Lainnya	30.000.000,00
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	30.000.000,00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
24	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018

f. Permasalahan Dan Solusi

Tabel III.C.5.6.
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum optimalnya penanganan persampahan	- penambahan luas TPA Wonorejo (identifikasi lahan sekitar TPA, kajian pengadaan lahan, dan pengadaan lahan TPA) - identifikasi calon lokasi TPA di 4 zona pewayalahan - pembangunan TPST di setiap kecamatan - pembangunan TPS 3r yang melayani lebih dari 1 desa - edukasi masyarakat secara masif dan kontinyu tentang pengelolaan persampahan - peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan - penegakan perda pengelolaan persampahan - meningkatkan peran serta masyarakat untuk mandiri dalam pengelolaan persampahan - mengadvokasi desa untuk membangun dan mengelola TPST skala desa
2	Meningkatnya limpasan air permukaan	- pembangunan sumur resapan di kawasan permukiman yang berada di zona resapan air tinggi - pembangunan <i>ecodrain</i> - revitalisasi saluran drainase - Pengaturan ketat persentase kawasan terbangun di kawasan resapan - Mengurangi pengolahan lahan budidaya yang merusak lingkungan di daerah hulu
3	Penyediaan RTH publik perkotaan masih dibawah standar pelayanan minimal	- Menambah luasan RTH publik - meningkatkan kualitas RTH
4	- Terbatasnya upaya pengawasan rutin terhadap jenis usaha/kegiatan yang berpotensi polutan	- Melakukan pengawasan secara rutin dan periodik terhadap semua jenis usaha dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan

III.C.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No	Permasalahan	Solusi
	- Masih banyak kegiatan/usaha yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan, sementara masih terbatas pada syarat administratif dengan menyusun dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPLH)	- Pemantauan secara intensif dan masif terkait implementasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) - melakukan pembinaan dan sosialisasi upaya pengelolaan lingkungan
5	Masih terjadinya praktik pertanian yang mencemari lingkungan (pengolahan lahan yang masif dan penggunaan pestisida, pupuk kimia yang berlebihan)	- Edukasi petani praktik pertanian ramah lingkungan - Demplot pertanian ramah lingkungan - Pengusulan Geopark Dieng
6	Menurunnya kualitas air sungai (tercemar e-coli dan bahan kimia lainnya)	- mengurangi cemaran yang terlarut - membuat IPAL domestik komunal, IPAL usaha kecil
7	Terbatasnya basis data sumber mata air dan hasil pantauan rutin kualitas dan kuantitas mata air	- penyusunan direktori mata air berbasis spasial dan pemantauan rutin dan periodik
8	Terbatasnya SDM handal, sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan lingkungan hidup	- Peningkatan kapasitas SDM dalam urusan lingkungan hidup - Optimalisasi operasional laboratorium lingkungan hidup
9	Kurangnya sinergitas dalam pengelolaan lingkungan	- meningkatkan sinergitas antar sektor dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup
10	Masih terbatasnya litbang dalam penyelesaian permasalahan/pengelolaan lingkungan terkait kegiatan usaha skala rumah rumah tangga	- mendorong kerjasama dengan lembaga penelitian untuk mendiseminasikan hasil litbang yang aplikatif